



## **PENGARUH GREEN GOVERNANCE UNTUK MENEKAN ENVIROMENTAL COST DAN MENUNJANG ECONOMIC BENEFIT KOTA MAKASSAR**

**Wendy Kala Tikupadang<sup>1)</sup>, Asrin Tandi<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus

<sup>2)</sup>Program Studi Mangister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan membuktikan bahwa penerapan ilmu akuntansi dapat langsung diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga berdampak pada pengelolaan sampah dengan benar dan mendukung pendapatan asli daerah (PAD) dan pemasukan publik.

Metode yang digunakan yaitu kualitatif dan metode ideal empiris untuk mengumpulkan data melalui percakapan serta riset kontribusi. Data utama yang diperoleh adalah observasi tepat serta percakapan dengan pemerintah kota terkait, penggiat sampah. Hasil yang digunakan dari berbagai referensi terpercaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya: 1) Audit kinerja instansi terkait, 2) Pengelolaan sampah di Kota Makassar, 3) Menyiapkan tempat pengumpulan sampah di masyarakat.

Signifikansi riset ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah untuk menerapkan tata kelola hijau menuju tata kelola yang baik, sehingga mengurangi biaya lingkungan, mendukung manfaat ekonomi daerah, dan mendukung pendapatan masyarakat.

**Kata Kunci:** Green Governance, Audit Kinerja, Benefit

---

\*Correspondence Address : [wendytikupadang@gmail.com](mailto:wendytikupadang@gmail.com), [asrintandi@ukipaulus.ac.id](mailto:asrintandi@ukipaulus.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v9i1.2022.182-188

© 2021UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Setiap daerah (region) pasti memiliki keinginan untuk melakukan kemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan percepatan pembangunan. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pembangunan tersebut di atas terkadang itu tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan. Kesenjangan antara kenyataan dan harapan juga bisa disebut masalah pembangunan yang salah satu penyebabnya adalah banyak kendala, baik kendala teknis maupun sosial dan finansial. Selain itu, perkembangan sektor-sektor tertentu terkadang dapat berdampak buruk serta menyebabkan menghambatnya laju perkembangan sektor lain, terutama jika tidak ada tindakan yang diambil antisipatif yang memadai untuk merespon dampak tersebut.

Pembangunan di atas pada hakekatnya adalah menyediakan produk serta layanan yang kaya untuk mencukupi berbagai kebutuhan seluruh lapisan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Namun upaya dalam proses penyampaian produk atau jasa, bahkan upaya pemanfaatan produk tersebut dalam berbagai aspek, terkadang justru menghasilkan pemborosan dalam berbagai bentuk, ukuran, jenis dan karakteristik yang berbahaya bagi masyarakat. Sampah yang paling umum dan umum yaitu sampah padat yang biasa disebut dengan limbah. Sampah dapat ditemukan dimana-mana dan seringkali menjadi sumber berbagai masalah terutama dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Limbah memiliki kandungan zat berbahaya bagi kondisi tubuh manusia. Tempat pembuangan limbah juga membuat pencemaran udara dengan mengeluarkan gas asam sulfat, dan penguraian bahan organik dalam limbah biasanya menghasilkan bau yang menyengat. Limbah dapat dijadikan tempat berkembang biaknya agen

penyakit, seperti lalat dan tikus. Lindi TPA akan membuat air tanah tercemar. Selain itu, limbah yang dicampakkan warga secara tidak sengaja dapat menyumbat aliran air permukaan di selokan, sehingga sering menyebabkan banjir di kawasan padat penduduk. Seperti disebutkan di atas, masalah sampah dan dampaknya terutama terjadi di perkotaan. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan tersebut di atas merupakan kawasan padat penduduk yang disertai dengan meningkatnya pemakaian berbagai produk. Namun, kawasan perkotaan juga memiliki berbagai kegiatan yang berkaitan Proses menghasilkan barang dan jasa. Semua ini mengakibatkan kawasan perkotaan menjadi kawasan dengan produktivitas sampah yang tinggi dan jalur dan/atau dampak yang bervariasi..

Semakin luas wilayah kota dan semakin tinggi produktivitas sampah, semakin rumit masalah yang mungkin timbul, terutama jika tidak dilakukan tindakan pencegahan yang efektif. Masalah sampah ini juga bisa mengancam Makassar, salah satu kota terbesar di kawasan timur Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkot Makassar sudah melaksanakan beberapa tugas pengelolaan limbah, mulai dari kegiatan sosial dan kesadaran masyarakat akan kebersihan, mengumpulkan sampah dari rumah warga dan mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta pembangunan tempat sampah horizontal. -jalan takson .

Seiring berjalannya waktu, kapasitas TPA ini semakin terbatas. Sampah di TPA semakin banyak. Hal ini menjadi fenomena, karena seolah-olah tidak ada pekerjaan pembuangan sampah yang dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan, dan APBD yang dikeluarkan untuk sampah ini cukup besar. Beberapa kota di Indonesia, seperti Surabaya, telah memanfaatkan sampah untuk hal-hal yang

menguntungkan, seperti mendaur ulang kertas bekas. Sedangkan di Kota Makassar, selain biaya pengelolaan yang tinggi, pemanfaatannya juga belum optimal, dibandingkan dengan daerah lain yang dapat memanfaatkan sampah, ini merupakan kesenjangan yang cukup besar. Fenomena gap ini memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian melalui penerapan ilmu akuntansi untuk mencari solusi yang berdampak positif.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mengadopsi pendekatan berorientasi domain. Penulis melakukan orientasi lapangan kunjungi TPA Tamangapa dan sekitarnya dan amati medan yang ada. Dalam tinjauan ini, penulis mengamati situasi secara langsung di tempat kejadian dan mencari informasi dari instansi terkait, Bappeda, dan Badan Pusat Statistik. Data tersebut didasarkan pada pengamatan visual berupa data, Hal ini akan sangat membantu dalam menginterpretasikan lebih detail data yang diperoleh melalui pengumpulan data, survey dan kegiatan survei.

#### **Pengumpulan data**

Data dikumpulkan, diperoleh dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Bappeda dan instansi terkait lainnya. Melalui observasi lapangan langsung dan wawancara dengan tokoh masyarakat/tokoh masyarakat, kepala desa dan aparat pemerintah terkait lainnya, sambil terus mengumpulkan data sekunder, dilakukan pengumpulan data secara langsung. Data lain yang dibutuhkan yaitu data kependudukan, program pembangunan kota, data iklim serta hidrologis, fasilitas pengolahan limbah yang ada, karakteristik limbah, penanganan limbah, keadaan wilayah, serta data lain yang terkait dengan maksud riset tersebut.

### **Studi dan Analisis**

Data yang dikumpul akan menjalani analisis deskriptif-kualitatif. Analisis atau penyelidikan berikut akan dijalankan. Analisis sosial dimohon dapat menerangkan:

1. Bentuk upaya yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Mendukung metode atau metode yang diperlukan untuk memberdayakan lembaga masyarakat seperti LKMD, PKK, Karang Taruna dan lain-lain agar dapat berperan terbaik dalam pengelolaan dan pengurangan sampah.

Analisis ekonomi Teluk dan manfaat yang diharapkan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tingkat relevansi rencana departemen dengan penemuan biaya, pencatatan biaya, analisis biaya, dan pelaporan biaya. (Madiasmo, 2002)
2. Pemanfaatan sampah yang luas menjadikannya suatu keuntungan

### **Analisis manajemen strategis instansi terkait:**

1. Hubungan antara perencanaan strategis (Solihin, 2012) dengan pengembangan pengelolaan persampahan.
2. Menurut analisis SWOT (Salusu, 2015), sejauh mana sumber daya manusia yang ada dan infrastruktur organisasi terkait digunakan meningkatkan produktivitas organisasi terkait, dalam hal ini jasa lingkungan.

### **HASIL DAN DISKUSI**

Berdasarkan riset penyelidikan langsung, percakapan bersama kepala desa, kepala desa, pemulung dan penggiat persampahan, diperoleh data sebagai berikut:

**A. Referensi serta penggunaan limbah**

Sebagian besar limbah di TPA Tamangapa asalnya dari Kota Makassar yang sebagian besar berasal dari Pasar Terong, 4 truk per hari, Makassar Shopping Mall 3 truk/hari, dan Pasar Pa'baeng-baeng 2 truk/hari. Rata-rata berat limbah per truk berjumlah 1-2 ton yang setengahnya merupakan limbah organik. Namun seluruh limbah yang masuk ke TPA berdasarkan sebagian referensi disatukan, total berat dapat beragam dari 400 hingga 500 ton per hari. Periode pengiriman sampah dari referensi ke TPA adalah 24 jam. Beberapa sampah yang masuk ke TPA diambil oleh pemulung yaitu sampah

plastik, gelas, kaleng, konstruksi dan jenis sampah anorganik lainnya.

**B. Pemulung mengumpulkan sampah**

Petugas kebersihan yang bekerja di TPA Tamangapa bekerja rata-rata 12 jam sehari dan pendapatan mereka berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per keluarga per hari. Rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja adalah 3 orang/keluarga, dan terkadang mereka bekerja secara bergantian (siang dan malam). Pendapatan dan jenis sampah yang dikumpulkan oleh pemulung dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

No	Jenis Sampah	Pendapatan (Rp)	Satuan/hari	Keterangan
1	Kaca	8.000	4 kg	Rata-rata per rumah tangga
2	Kabel	3.500	0,1 kg	Rata-rata per rumah tangga
3	Plastik	25.000	25 kg	Rata-rata per rumah tangga
4	Besi	1.500	10 kg	Rata-rata per rumah tangga
5	Kaleng	15.000	15 kg	Rata-rata per rumah tangga
6	Aluminium	5.000	0,5 kg	Rata-rata per rumah tangga

**Tabel 1. Taksiran pendapatan pemulung dirinci berdasarkan jenis sampah**

Limbah yang dikumpulkan pada Tabel 1 didapat berdasarkan hasil percakapan petugas kebersihan di lokasi TPA. Tabel 2 berisi ringkasan jumlah

sampah yang terkumpul per orang berdasarkan jenis sampah sebagai berikut:

No	Jenis	Sumber sampah	Taksiran banyaknya yang dikumpulkan /orang		Keterangan
			Satuan/Hari	Satuan/Bulan	
1	Sampah organik	-	-	-	-
2	Sampah anorganik (kaca logam/kaleng, plastik)	TPA	20 kg	400 kg	-

**Tabel 2. Perkiraan jenis sampah yang dikumpulkan oleh pemulung/hari/keluarga**

Data pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pemulung hanya mengumpulkan/memanfaatkan sampah anorganik dan tidak menggunakan sampah organik sama sekali. Sampah yang terkumpul kemudian dijual oleh

masing-masing pemulung sebagai yayasan koperasi dengan bantuan yayasan masyarakat, karena pemulung tidak memiliki organisasi yang dapat mengumpulkan hasil pungutan untuk dijual. Selain mendukung pemasaran, yayasan komunitas ini juga membagikan

penataran serta latihan tentang cara mengumpulkan sampah, cara berbisnis, dan mendidik anak-anak pemulung. Nama yayasan tersebut adalah Yapta, dan tujuan utamanya adalah untuk mendidik anak-anak petugas kebersihan. Limbah yang digabungkan oleh petugas kebersihan dibayar oleh pedagang dan dijual ke industri di Makassar yang sebagian diangkut ke Surabaya.

Penjualan sampah yang terkumpul meliputi 4 kelompok yaitu: TPA, Desa Borong Jambu, Banua dan Sakura yang dikelompokkan sesuai dengan tempat tinggal para pemulung. Selain keempat lokasi tersebut di atas, ada beberapa pemulung yang tinggal di Buntoya, sekitar 700 meter dari TPA. Jumlah petugas kebersihan dibagi dengan persentase unit rumah ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini:

No	Lokasi	Persen (%)
1	TPA	40
2	Borong Jambu	25
3	Kampung Banua	20
4	Sakura	10
5	Bontoa	5

**Tabel 3. Persentase pemulung berdasarkan tempat bermukim**

Petugas kebersihan yang bekerja di TPA Tamangapa menghuni rumah kontrakan, dan setiap rumah biasanya dihuni oleh lebih dari satu anggota keluarga. Jika di rata-rata biaya hidup per keluarga adalah Rp 20.000, serta petugas kebersihan terbanyak asalnya dari luar Makassar yaitu: Kabupaten Bululumba, Jeneponto, Bantaeng, Takalar dan Gowa, dimana Kab memiliki total Jeneponto terbanyak.

A. Percakapan serta analisis data informasi dari pejabat instansi terkait dan anggota DPRD Makassar:

Berdasarkan hasil percakapan dan analisis data, informasi tersebut

nantinya diolah dan dirangkum oleh beberapa pejabat instansi terkait serta penulis untuk anggota DPRD Makassar, antara lain Bapak Andi Iskandar (Sekretaris Biro Perlindungan Lingkungan Hidup), Bapak Hamzah Hamid, Amar Bustanul dan Pak Mario David (tiga anggota DPRD Makassar) mengatakan:

1. Pada tahun 2016, pemerintah mengalokasikan 15 miliar yuan untuk pengumpulan sampah, diharapkan 100% dari hasil penjualan sampah oleh 368 tempat pembuangan sampah akan dikembalikan, tetapi hanya 2,5 miliar yuan yang terealisasi. (Berita Kota 2018)
2. Karena tidak memenuhi standar, pemerintah kembali memperkirakan 10 miliar pada 2017 (Berita Kota 2018)
3. Pemerintah mendirikan bank sampah masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan meningkatkan pendapatan lokal dan masyarakat. Pemerintah menghabiskan 3 miliar yuan setiap tahun untuk membeli kantong sampah organik kering dan kantong plastik di masyarakat
4. Jumlah harian sampah organik kering yang dibeli oleh pedagang besar adalah 10 ton.
5. Menurut Andy Iskandar, sebanyak 800 unit tong sampah buatan tahun 2017 yang sudah tersebar di seluruh ruas jalan, namun belum diketahui omzetnya.
6. Menurut Pak Mario David, struktur pengelolaan sampah dan bank sampah kurang baik, pegawai terkait tidak

disiplin, dan pekerjaan hanya dilakukan sesuai perintah atasan, tanpa perencanaan anggaran yang matang, seperti memimpin untuk kebaikan manajemen anggaran.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menganalisis:

1. Analisis Sosial: Pemerintah membutuhkan upaya yang lebih kreatif untuk memberdayakan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, karena TPA yang dibentuk oleh pemerintah tidak berfungsi dengan baik. Mereka yang mendonasikan sampahnya ke bank sampah yang didirikan pemerintah tidak bisa langsung menerima dana setelah transaksi, dan partisipasi masyarakat sangat rendah.
2. Analisis Aspek Ekonomi dan Manfaat: Perencanaan keuangan dan pelaksanaan rencana bank sampah oleh instansi terkait tidak berjalan lancar, sehingga terjadi peningkatan anggaran tahunan.
3. Analisis manajemen strategis instansi terkait: Berdasarkan data dan pengamatan langsung, renstra instansi terkait tidak berjalan dengan lancar, sehingga pengelolaan sampah, penganggaran dan perencanaan perpustakaan sampah tidak terlaksana dengan baik. Bahkan program Bank Sampah sempat terhenti di beberapa titik.

## **KESIMPULAN**

Pengaruh dari hasil riset tersebut dimohon bisa dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota Makassar

terhadap *green governance* untuk menahan biaya lingkungan dan mendukung manfaat ekonomi, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta pemasukan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit kinerja jasa lingkungan diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi serta peluang dan tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran kepegawaian.
2. Menata ulang persampahan di Kota Makassar dan membekali karyawan dengan visi "hijau", sehingga tidak hanya mengikuti perintah atasan dalam menjalankan pekerjaannya, tetapi juga mempercepat peningkatan pengelolaan sampah.
3. Rencana pemerintah perlu diubah dari rencana bank limbah dijadikan rencana ekspor limbah agar masyarakat serta seluruh bagian yang terlibat langsung dalam transaksi sampah dapat langsung menikmati hasilnya, karena dalam rencana ekspor sampah pengelola toko tidak hanya langsung memberikan uang tunai kepada pemulung, namun dapat juga membagikan pendidikan tentang limbah. Ketika sampah yang dikumpulkan dari masyarakat atau penjual/penyedia sampah diserahkan dari toko sampah ke pengumpul atau orang tua, pengelola tempat sampah dapat segera mengumpulkan sejumlah uang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta. Penerbit Andi

Solihin, 2012, *Manajemen Strategik*. Erlangga

Salusu, 2015, *Pengambilan Keputusan Stratejik*

Berita Kota Makassar, 20 Maret 2018